

INDUSTRI & PERDAGANGAN

KKP Jamim PP 27/2021 Beri Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (P-P) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan tangkap. Proses perizinan kapal perikanan yang semula menjadi wewenang Kementerian Perhubungan kini terintegrasi di KKP.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan PP 27/2021 tersebut membawa dampak positif pada tata kelola bidang perikanan tangkap menjadi lebih maju dan efisien. Izin persetujuan nama, pengukuran dan kelainan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan menjadi menjadi wewenang KKP.

"Pelaku usaha akan semakin mudah mengurus izin kapal perikanan. Mulai dari kapal diusulkan untuk dibangun hingga sertifikasi awak kapal perikanan semuanya terintegrasi di KKP," tutur Zaini.

Terkait pembangunan, modifikasi dan impor kapal perikanan, Zaini menegaskan agar pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan sebelumnya oleh Menteri Perdagangan. Tak hanya itu, hal ini dilakukan apabila galangan kapal dalam negeri tidak mampu memproduksi kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan.

"Persetujuan tersebut diberikan juga melihat ketersediaan sumber daya ikan, usia kapal perikanan, ukuran kapal perikanan dan yang paling penting tidak tercantum dalam kapal perikanan yang melakukan kegiatan IUU fishing," jelas Zaini.

Sedangkan terkait pe-

ngawakan kapal perikanan Ditjen Perikanan Tangkap akan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang mencakup pendidikan, pelatihan hingga sertifikasi.

"Kita akan pastikan awak kapal perikanan mendapatkan perlindungan kerja sebelum, saat dan setelah bekerja.

Tidak hanya dari aspek hukum namun juga jaminan sosialnya. Kita akan dorong ini nantinya ke dalam peraturan menteri untuk penjelasan lebih rinci," tambah Zaini.

Reformasi perizinan ini sejalan dengan amanah Presiden RI, Joko Widodo yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Terobosan ini juga mendukung program kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain memudahkan proses perizinan usaha juga akan mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga optimis dengan penetapan PP 27/2021 yang berdampak pada kemudahan berusaha dan berperan terhadap pemulihan ekonomi nasional yang terganggu akibat pandemi Covid-19.

Seperti diketahui bahwa PP 27/2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Trenggono mengklaim PP ini merupakan solusi dari tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi, khususnya di bidang kelautan dan perik-

anan.

Lebih lanjut, PP tersebut juga mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Pertama, dalam pemanfaatan ruang laut diatur kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat tetap terjaga dan sustainable.

Kedua terkait penataan ruang laut, adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut.

Ketiga pengaturan sektor perikanan tangkap. Penetapan PP 27/2021 membuat berbagai perizinan terkait kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi kini berada dalam satu pintu, di KKP saja.

Sementara itu, reformasi perizinan diprioritaskan untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Bahkan melalui PP Nomor 27 Tahun 2021 juga mengatur dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

"Pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan, kini akan menggunakan dan mengedepankan sanksi administratif," jelas Trenggono.

Sehingga Trenggono berharap, dengan adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut.

Sebab, membuat berbagai perizinan terkait kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi, kini berada dalam satu pintu di KKP saja. ■ agus/gro



PANEN KOPI SOLOK : Petugas mengecek kualitas buah kopi di pengolahan kopi Koperasi Solok Radjo, Aie Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu (6/3/2021). Selama pandemi COVID-19, petani kopi khas Solok di daerah itu mengeluhkan harga buah kopi yang rendah yakni Rp6.000 per kilogram.

Pemerintah dan Pelaku Usaha Perkuat UKM

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan para pelaku usaha bersinergi untuk memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia agar bisa melakukan ekspor dan berjaya di pasar global. Dengan demikian, UKM dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi peningkatan neraca perdagangan Indonesia.

■ NERACA

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, Kemendag berkomitmen membantu para pelaku UKM untuk melakukan ekspor dan meningkatkan daya saingnya. Kemendag juga siap mendukung pelaku UKM melalui perwakilan perdagangan di luar negeri serta dengan membuka akses pasar di negara-negara nontradisional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan arahan pada Pembukaan Raker Kemendag, di Istana Negara, Jakarta.

Sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha bertujuan mencari pasar ekspor yang masih jauh dari kompetisi. Terlebih, pasar-pasar konvensional seperti Amerika Serikat cenderung sudah padat.

"Pasar konvensional semakin tidak dilirik oleh kompetitor, sedangkan pasar baru akan menjadi semakin menarik karena pasarnya masih belum kompetitif," tambah Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan.

Menurut Kasan, adapun sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penguatan UKM. "Penguatan UKM dapat tercapai jika semua pihak turut berpartisipasi dalam pemberdayaan UKM; melakukan kolaborasi, kemitraan, dan mengedepankan azas keberlanjutan; serta semangat untuk terus memajukan UKM dari seluruh Indonesia agar dapat berjaya menjadi pemain global," jelas Kasan.

Founder Javara, Helianti Hilm mengaku, Javara melakukan ekspor produk organik produk ke Afrika

Selatan dan Ekuador. Javara memfokuskan penjualan produk organiknya di pasar premium.

Di samping itu, Javara juga memiliki cara untuk memangkas ongkos ekspor melalui perdagangan langsung (direct trade), sehingga harga produk organik dapat terjual dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Meski begitu, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain menyesuaikan produk dengan pasar tujuan ekspor, memiliki strategi pemasaran yang tepat, memiliki rekan kerja yang kredibel untuk menekan risiko, serta melakukan riset pasar dan memahami rantai pasar.

"Dengan menggunakan direct trade, buyer juga dapat mendapatkan harga beli yang lebih murah sehingga menguntungkan kedua belah pihak," jelas Helianti.

Kemudian CEO Madame Gie, Teddy Kastowo Tjhim menambahkan, mengenai produk kosmetik bermerek Madame Gie. Penjualan produknya memanfaatkan kemajuan dunia digital. Produk-produk Madame Gie juga terjual laris di pasaran dengan melakukan promosi melalui media sosial.

Di tengah pandemi Covid-19, Madame Gie me-

lakukan pertumbuhan dan improvisasi dengan memproduksi masker. "Pandemi Covid-19 ini juga membuat kami tidak bisa mengikuti pameran berskala internasional. Untuk itu, kami memanfaatkan lokapasar (marketplace) untuk dapat menjual produk kami ke luar negeri," ungkap Teddy.

Sementara itu, CEO PT Ori Ginalnest Indonesia, Rusianah menjelaskan tentang ekspor sarang burung walet yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Industri sarang burung walet ini juga menyerap banyak tenaga kerja karena pembuatannya hingga saat ini belum bisa digantikan dengan teknologi.

"Selain banyak mempekerjakan masyarakat, orientasi sarang burung walet juga sangat diminati di dunia internasional, khususnya Tiongkok. Untuk itu, diharapkan pemerintah akan terus membantu kemajuan ekspor sarang burung walet," imbuh Rusianah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor, Handito Joewono mengingatkan dalam hal ini terdapat lima pilar utama strategi akselerasi peningkatan ekspor Indonesia, yaitu penambahan jumlah ekspor, diver-

sifikasi produk ekspor, pengembangan pasar ekspor, peningkatan harga ekspor, dan pengembangan ekosistem ekspor.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat ini Indonesia sedang bertransformasi dari negara eksportir barang mentah dan setengah jadi, menjadi negara eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Beberapa sektor yang konkret menunjukkan transformasi tersebut antara lain pada ekspor komoditas besi baja; kendaraan bermotor; serta perhiasan yang memberikan tingkat upah yang cukup tinggi dan melibatkan banyak UKM Indonesia.

Saat ini, perlu dilakukan langkah bersama dalam mengidentifikasi produk-produk UKM yang akan diangkat ke pasar internasional. Disamping juga diperlukan berbagai kegiatan serta langkah-langkah peningkatan kualitas dan performa produk-produk UKM dalam negeri tersebut.

"Dengan identifikasi yang cermat dan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kita dapat mengembangkan berbagai produk UKM potensial," ujar Jerry. ■ iwan/gro



PRODUK OLAHAN IKAN : Pelaku usaha memperlihatkan produk olahan ikan di industri rumahan aneka olahan Ilele Matrix, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Jumat (5/3/2021). Memasuki tahun kedua masa pandemi COVID-19 di Indonesia, pelaku UMKM di Kabupaten Jember, seperti peternak ilele mengolah komoditas mereka sampai ke produk olahan dan memasarkannya secara daring.

Pengembangan Agrowisata Buah Terus Dipacu

NERACA

Magelang, - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau kawasan kebun agrowisata buah kelengkeng Borobudur di Kabupaten Magelang guna meningkatkan pengembangan budidaya pada berbagai daerah.

"Agro wisata di Kabupaten Magelang luar biasa. Kita akan dorong terus untuk kawasan buah lokal bisa dikembangkan jangan di satu daerah tapi di setiap daerah ada," kata Syahrul.

Meski begitu, pengembangan kawasan buah lokal harus memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah.

Bahkan harus dikelola secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk buah lokal yang dikembangkan.

"Kebun kelengkeng ini menjadi salah satu tempat objek wisata. Selain memiliki Candi Borobudur, Kabupaten Magelang memiliki Wisata Kebun Leng-

keng," tambah Syahrul. Dikesempatan yang sama, pemilik Agro Wisata Kebun Kelengkeng Borobudur sekaligus Anggota Koramil 19/Borobudur Kodim 0705/Magelang, Mugiyanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan Mentan SYL di lahan agro wisata kebun kelengkeng yang dikelolanya seluas 1,3 hektare dengan populasi tanaman 250 pohon jenis Kateki.

"Kedepan lahan ini perlu di duplikasi di daerah lain. Ada lebih dari 8.000 desa di Indonesia, seandainya setiap desa memiliki minimal 1 hektare lahan yang ditanam dengan buah lokal maka kebutuhan Indonesia untuk buah lokal tentu akan terukupi," ucap Mugiyanto.

Mugiyanto mengaku dalam waktu dekat melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk keperluan kawasan kebun kelengkeng. Selain itu, pengembangan kebun kelengkeng ini memiliki pohon induk yang sudah disertifikasi sehingga setiap tahun bisa menghasilkan benih ke-

lengkeng mencapai 100.000 benih yang siap tanam dan untuk mendukung program pemerintah.

"Benih sudah tersebar hampir diseluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua sudah ada. Kebetulan di Kalimantan Timur kita juga mendampingi petani di bawah Dinas Provinsi Kalimantan Timur," terang Mugiyanto.

Menurut Mugiyanto, peluang usaha budidaya kelengkeng sangat menjanjikan. Sebab kebutuhan nasional Indonesia menurut data mencapai 80 ribu ton hingga 90 ribu ton setiap tahun sebagian didatangkan dari luar.

"Bertani saat ini tidak kotor dan tidak susah apabila mau terus berinovasi. Kita saja disini memiliki petani binaan Kabupaten Magelang yang memang mendukung kebutuhan mensupport kebutuhan disini.

Dikebut kelengkeng ini menghasilkan 12 sampai 15 ton jadi kekurangan dari permintaan kita ambil dari petani-petani binaan," ucap Mugiyanto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura, Ke-

mentan, Prihasto Setyanto menambahkan, pengelolaan kebun kelengkeng ini merupakan model pengembangan budidaya kelengkeng berbasis kawasan yang memberikan keuntungan baik pada pengelolaan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Ini agar menjadi inspirasi bagi para pemuda tani. Saya bangga dan haru kepada Mugiyanto yang baru mengetahui ternyata seorang TNI penyandang disabilitas di Kodim 0705 Magelang," jelas Prihasto.

Prihasto mengatakan pertumbuhan positif sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah komoditas hortikultura yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,85 persen.

Ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan buah dan sayur selama pandemi Covid-19.

"Komoditas hortikultura juga tumbuh 7,85 persen karena permintaan buah-buahan dan sayuran selama pandemi Covid-19," kata Prihasto.

Seperti diketahui, Jawa

Tengah merupakan sentra Lengkung terbesar, dengan 167 ribu pohon dengan jenis lengkung Batu, Selarang, Pingpong, Diamond River, Itoh, Mutiara Poncosukumo dan Kateki. Lokasi sentra tersebar lengkung di Jawa Tengah yakni Kabupaten Semarang, Bora, Karanganyar, Klaten, Jepara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, dan Sragen.

"Mari mengonsumsi buah lokal. Kandungan karbohidrat dalam buah Lengkung cukup banyak, sedangkan lemak dan kalorinya rendah, sehingga bisa menjadi asupan sumber karbohidrat dan menjaga stamina," tambah Prihasto.

Prihasto optimis, di tahun 2021, Kementan terus meningkatkan produk hasil hortikultura, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tiga strategi utama pengembangan hortikultura 2021-2024, yaitu pengembangan Kampung Hortikultura, penumbuhan UMKM Hortikultura dan digitalisasi pertanian melalui pengembangan sistem informasi. ■ iwan/gro

GAS
PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GAYA ABADI SEMPURNA TBK.

Direksi PT GAYA ABADI SEMPURNA, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 4 Maret 2021
Tempat : SELIS Kelapa Gading
Jalan Raya Kelapa Gading Permai
Blok A No. 8-9, Jakarta Utara

Waktu : 14.13' WIB s/d 14.21' WIB

RUPS Luar Biasa

Acara : Mata Acara Rapat :
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yaitu :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tjoe King Hoa
Direksi
Direktur Utama : Edi Hanafiah Kwantio
Direktur : Wilson (alias Wilson Ng)

C. Pemimpin Rapat

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Tjoe King Hoa selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.500.000.300 saham yang merupakan 75% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
	1.500.000.300 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara Rapat

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar;
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikucualikan

Jakarta, 8 Maret 2021
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk
Direksi Perseroan